

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto**

###### **2.1.1.1 Pengertian PDRB**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menuunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2007:2).

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktifitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB sebagai indikator ekonomi makro, juga sebagai landasan ekonomi evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa.

#### **2.1.1.2 Fungsi PDRB**

Fungsi PDRB antara lain:

- 1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi menghasilkan oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar,
- 2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu region atau provinsi,
- 3) Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun,
- 4) PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah,
- 5) PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar,
- 6) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi,

- 7) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau provinsi,
- 8) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang,
- 9) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

### **2.1.1.3 Metode Perhitungan PDRB**

Menurut BPS (2002) pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung PDRB yang ditimbulkan dari suatu daerah terdapat empat pendekatan yang digunakan (BPS 2002), yakni ;

#### **a. PDRB Pendekatan Produksi**

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada z`di suatu wilayah /provinsi dalam periode tertentu (biasanya dalam satu tahun). Unit-unit tersebut dikelompokan menjadi sembilan lapangan usaha yaitu:

- a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan,
- b) Pertambangan dan penggalian,

- c) Industri pengelolaan,
  - d) Listrik, gas, dan Air bersih,
  - e) Konstruksi,
  - f) Perdagangan, hotel, dan restoran,
  - g) Informasi dan komunikasi,
  - h) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan,
  - i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
- b. PDRB Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan, pajak langsung dan lainnya.

Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto sedangkan jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

- c. PDRB Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan

sosial. Pembentukan modal dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut, harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

d. Metode Alokasi

Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan pendapatan regional dengan metode langsung.

#### **2.1.1.4 Cara Penyajian PDRB**

Adapun cara penyajian PDRB dapat dilakukan dengan,

- a. PDRB atas harga berlaku, yakni semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
- b. PDRB atas harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil, bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

#### **2.1.1.5 Perubahan Tahun Dasar PDRB**

Teknologi dan perekonomian tiap tahun senantiasa mengalami perkembangan dan berakibat pada perubahan struktur ekonomi secara

terus menerus. Perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai dengan adanya globalisasi berpengaruh terhadap perekonomian regional/domestik. Terjadinya krisis perekonomian suatu kawasan akan berdampak adanya perubahan struktur ekonomi sehingga penggunaan tahun dasar di bawah tahun 2000 tidak representatif lagi digunakan sebagai tahun dasar perhitungan PDRB.

Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional yang dinyatakan bahwa estimasi PDB/PDRB atas dasar konstan harus dimuktakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun refrensi yang berakhiran 0-5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka PDB/PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara, provinsi, kabupaten dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah.

Tahun dasar yang dianggap representatif untuk mengukur laju perekonomian adalah tahun dasar 2000, hal ini dikarenakan tahun tersebut dianggap relatif lebih stabil setelah krisis ekonomi dan politik Indonesia tahun 1997. Cara penyamaan tahun dasar dapat dilakukan dengan membandingkan nominal atau angka PDRB yang tertera pada tahun dasar yang berbeda (1983, 1988, 1993) dengan PDRB tahun dasar 2000.

## **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan. Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

### 2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1) Sebagai sumber pendapatan daerah

2) Sebagai alat pengatur

## 2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya undang-undang pajak dan 10 retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b.       Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c.       Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).

3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

#### **2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta

untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita: 2011).

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat

digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

#### **2.1.2.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah**

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai

keajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

#### **2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja Barang,
- 3) Subsidi,
- 4) Hibah,
- 5) Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal meliputi:

- 1). Belanja Modal Tanah,
- 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- 4). Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
- 5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
- 6). Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah

seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

### **2.1.3.3 Pendekatan-Pendekatan Fungsi Belanja Daerah**

#### **a. Pendekatan Pengeluaran**

Menurut pendekatan pengeluaran, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling tumpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat objektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi.

#### **b. Pendekatan Pendapatan**

Menurut pendekatan pendapatan, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

## 2.1.4 Investasi

### 2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003: 4)

Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari  $PDB = C + I + G + (X-M)$ .

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Eni Setyowati dan Siti Fatimah N: 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

#### **2.1.4.2 Teori Investasi**

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

##### **a. Teori Neo Klasik**

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasiak,

Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

b. Teori Harrod-Domar.

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

#### **2.1.4.3 Jenis-jenis Investasi**

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

- a. Investasi portofolio (portofolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya

berlangsung melalui lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

- b. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanam modalnya di Indonesia.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun

peningkatan kerjasama antara pihak swasta nasional dengan swasta asing. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi.

Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh Undang-Undang No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. Undang-Undang itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paketpaket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh

rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan).

Investasi berdasarkan timbulnya:

- 1) investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional;
- 2) investasi terpengaruh (*induced investment*) investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

Menurut Sadono Sukirno (2003:5) investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi:

- 1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri;
- 2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan
- 3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

## 2.1.5 Tenaga Kerja

### 2.1.5.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga Kerja memiliki beberapa definisi, menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pada Undang Undang No. 25 Tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan pada undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak menurut Undang Undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Mulyadi juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

#### **2.1.5.2 Klasifikasi Tenaga Kerja**

Pada dasarnya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

##### **a) Angkatan Kerja**

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk kerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau

mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep ini disebut dengan pengangguran terbuka.

Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dan keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

b) Bukan Angkatan Kerja

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan terkait definisi penduduk bukan angkatan kerja diantaranya yaitu, menurut Ostinasia yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia

kerja yang dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja berusia 10 tahun keatas yang selama seminggu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja, oleh sebab itu kelompok ini sering dimaksud *potential labor force*.

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.

Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang

ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **2.1.5.3 Permintaan Tenaga Kerja**

Menurut Sumarsono, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Sudarsono, menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

Pada dasarnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja:

1. Pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi,
2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan jembatan dan sebagainya.

Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memperoleh penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan bagi tenaga kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, sebab jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi jumlah pendapatan nasional karena barang dan jasa, memungkinkan dilakukannya tabungan yang bisa untuk investasi. Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan tenaga kerja.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Begitu juga halnya yang terjadi dalam industri kecil, pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih baik dalam produktivitas kerjanya dan juga dalam mengelola usaha, hal tersebut sesuai dengan teori *human capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

#### **2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau terserap oleh perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarno, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu:

##### **1. Perubahan Tingkat Upah**

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan

berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

- 2) Apabila upah naik dengan asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

## 2. Perubahan Permintaan Hasil Akhir Produksi Oleh Konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

## 3. Harga Barang Modal Turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

### 2.1.5.5 Teori Ketenagakerjaan

Ada beberapa teori mengenai ketenagakerjaan menurut para ahli, sebagai berikut:

#### 1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

#### 2. Teori Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai deret hitung.

Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau

pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

### 3. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan yang dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Tahun/ judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Dwika Julia mutiara (2015). Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur.	PDRB, Belanja Daerah	pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, Tenaga Kerja, Investasi	secara bersama-sama bahwa pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap PDRB periode 2004-2013.	Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Vol. 4 No. 1 April 2015
2.	Dewi Maharani (2016) Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara.	PDRB, Tenaga kerja, Investasi	Investasi Domestik & Investasi Asing Belanja Daerah	Investasi Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh secara significant terhadap PDRB di Sumatera Utara.	Intiqad Vol. 8 No. 2 Desember 2016: 32 - 46
3.	Harry A. P. Sitaniapessy (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD	PDRB, PAD, Belanja Daerah	Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan. PAD, Tenaga Kerja, Investasi	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Sektor Perindustrian dan Perdagangan baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu	Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, April 2013

				PDRB berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	
4.	Novita Linda Sitompul (2007). Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara.	PDRB, Tenaga Kerja, Investasi	Investasi PMDA & PMDN, Kondisi perekonomian, Belanja Daerah	investasi PMDN tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sumatera utara	<i>USU e-Repository @2008</i>
5.	Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012.	PDRB, Belanja Daerah	Tabungan, kredit, PAD, Tenaga Kerja, Investasi	Tabungan, Posisi kredit, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Daerah berhubungan positif terhadap PDRB Kabupaten	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.2 Desember 2016
6.	Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2016). Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar.	PDRB, PAD	Pajak Daerah	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar melalui Pajak Daerah yang merupakan variabel mediasi.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6, Juni 2014
7.	Laeni Najiah (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010.	PDRB	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tenaga Kerja, Investasi, Belanja Daerah	variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama pengaruh pada PDRB Kota. secara parsial Variabel Pendapatan asli daerah dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Depok, sedangkan Variabel	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2013

				dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Depok	
8.	Kukuh Arisuaka (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Pulau Sumatera Tahun 2000-2006 (Studi Kasus Bencana Tsunami).	PDRB, Tenaga kerja	Ekspor, PMDN, PMDA, Tenaga Kerja, Belanja daerah	Secara simultan variabel ekspor, PMA, PMDN, dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh terhadap PDRB. secara parsial variabel ekspor, PMDN dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan variabel PMA tidak mempengaruhi PDRB	ADN Perpustakaan Universitas Airlangga
9.	Ester Lina Nofpana Sari (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2010-2016 (Studi Kasus 32 Provinsi di Indonesia).	PDRB Tenaga Kerja, Investasi	Penduduk Bekerja, APS SMA, APS PT, PMA, PMDN, PAD, DAU,	Penduduk Bekerja, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi sekolah PT, pendapatan asli daerah, berpengaruh positif terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia.	Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Tahun 2018

10.	I Ketut Sumadisa, Ni Made Tisnawati dan I G.A.P. Wirathi (2016). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014.	PDRB	Tenaga Kerja, Investasi, Belanja daerah pertumbuhan PDRB, Penanaman modal asing, Infrastruktur jalan, Infrastruktur listrik,	Pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, infrastruktur listrik dan PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.5, No.7 Juli 2016
-----	---	------	--	---	--

Dari sekian banyak penelitian tersebut yang paling jelas belum diteliti adalah pengaruh Belanja Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB dan dampak langsungnya terhadap PAD. Selanjutnya untuk objek penelitiannya, kebanyakan penelitiannya kepada Provinsi-provinsi saja, sedikit yang fokus atau konsen kepada kabupaten/kota walaupun ada beberapa penelitian menggunakan *sampling* se-provinsi/wilayah.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009).

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, salah satunya terlihat dengan penggunaan belanja daerah dalam membiayai baik belanja pemerintahan sampai ke belanja untuk masyarakatnya setiap tahunnya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerahnya.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut, yang nantinya berdampak terhadap Pendapatan Asli daerah sebagai salah satu sumber dana perekonomian..

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, untuk mempermudah penulis dalam penelitian dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh belanja daerah, tenaga kerja dan investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Garut.

## **2.2.1 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1.1 Hubungan Belanja Daerah dengan PDRB**

Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah (Belanja daerah) meningkat, maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), maka peningkatan PDRB berarti peningkatan pendapatan nasional.

Dalam penelitian Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia (2015), yang berjudul faktor faktor yang mempengaruhi PDRB kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyatakan bahwa belanja daerah berhubungan positif terhadap PDRB kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

#### **2.2.1.2 Hubungan Investasi dengan PDRB**

Menurut teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jika investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat. Seperti halnya dalam penelitian Dewi Maharani (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara, menyatakan bahwa Investasi (Domestik ataupun Asing), berhubungan positif terhadap PDRB. Sehingga apabila investasi meningkat maka PDRB meningkat juga.

#### **2.2.1.3 Hubungan Tenaga Kerja dengan PDRB**

Tenaga kerja dipandang sebagai satu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan faktor produksi lainnya (mengelola tanah, memanfaatkan modal, mesin dan lain sebagainya) sehingga menghasilkan

tambahan output produksi yang kemudian akan menaikkan output nasional. Tanpa adanya peran tenaga kerja maka kegiatan produksi tidak berjalan, namun jika penggunaan tenaga kerja yang tidak memadai juga akan mengganggu jalannya proses produksi sehingga output produksi menurun, hal ini akan menurunkan tingkat konsumsi dan berakibat menurunkan tingkat investasi, bila tingkat investasi rendah pada akhirnya akan membuat kegiatan perekonomian memburuk. Hal ini semakin didukung dengan penelitian dari Novita Linda Sitompul (2007), yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara.

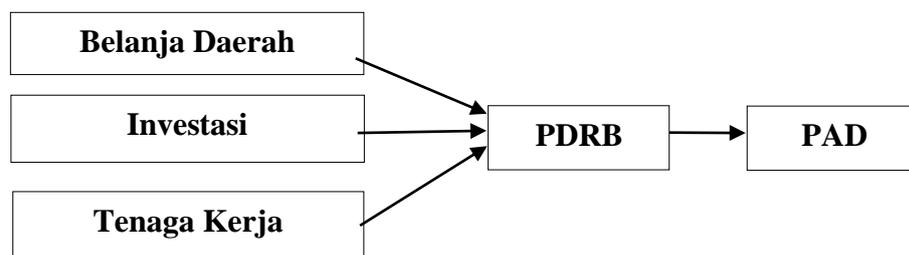
#### **2.2.1.4 Hubungan PDRB dengan PAD**

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan (Rahman, 2013). Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Prasedyawati, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitiannya, Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2016), dengan judul Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, menyatakan bahwa secara

langsung PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota Denpasar Bali.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tentang “Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB serta dampaknya terhadap PAD Kabupten Garut tahun 2010-2019” digambarkan dengan gambar skema sebagai berikut



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka dapat ditarik hipotesis:

1. Diduga secara parsial belanja daerah, investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Garut.
2. Diduga secara bersama-sama belanja daerah, investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Garut.
3. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Garut.